

PEMBANGUNAN APARAT POLRI UNTUK MENGHADAPI GANGGUAN KAMTIBMAS SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT DALAM REPELITA VII

Oleh Awaloedin Djamin*)

Pendahuluan

Seperti yang diamanatkan GBHN semenjak awal Orde Baru, penyempurnaan aparatur negara, yang menurut UUD 1945 mencakupi MPR sebagai lembaga negara tertinggi, lembaga-lembaga negara tinggi, yaitu DPR, BPK, Kepresidenan dan seluruh aparat kekuasaan pemerintahan negara, DPA dan Mahkamah Agung serta seluruh aparat kekuasaan kehakiman harus dilakukan secara terus-menerus, berencana serta bertahap. Dengan demikian keadaan dan kemajuan yang telah dicapai sampai sekarang harus dari waktu ke waktu dievaluasi secara objektif dengan memperhitungkan kelemahan dan kekurangan yang masih dimiliki serta tantangan yang dihadapi dimasa depan.

Mengevaluasi kondisi aparat menurut kemampuan dalam mendiagnosa, yang di bidang administrasi negara dan management dikenal sebagai "Administrative Analysis" atau "Organization and Method". Hanya dengan diagnosa yang tepat, akan terdapat terapi yang tepat.

Aparat Polri, merupakan bagian integral dari aparatur pemerintahan dan aparatur negara. Polri adalah aparat (alat) negara penegak hukum yang juga harus menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Polri merupakan bagian dari ABRI, tapi tidak termasuk Angkatan Perang, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Walaupun demikian undang-undang memberlakukan hukum militer bagi anggota Polri.

Para pakar mengamati, bahwa "lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif juga kalangan sesama eksekutif lebih banyak berjalan sendiri-sendiri, kurang terpadu dan terkoordinasi, semuanya ini bukti dan akibat tidak jelasnya doktrin dan wawasan politik hukum kita secara nasional dan atau "kurangnya kesungguhan menghadapi masalah hukum". Sebagai negara hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, disiplin nasional dan kepatuhan hukum, rasa aman dan tenteram mendorong kreativitas serta mendukung stabilitas yang mantap dan dinamis. Semua ini juga merupakan dambaan dari rakyat Indonesia secara keseluruhan.

*) Penulis adalah mantan Kapolri dan Dekan PTIK Jakarta.

Tantangan Repelita VII dan PJP II

Semenjak dekade 80-an sampai sekarang, telah banyak sekali pakar internasional ataupun nasional yang membahas Abad XXI sebagai era globalisasi, dunia tanpa batas, kepesatan perkembangan ilmu dan teknologi, terutama teknologi informasi, dan lain-lain dengan segala tantangan dan kesempatan yang mengikutinya. Khusus bagi Indonesia, Presiden Soeharto sendiri menekankan bahwa suka atau tidak suka Indonesia akan memasuki era globalisasi tersebut antara lain dengan akan dilaksanakannya kesepakatan AFTA dan APEC.

Pembangunan nasional dalam PJP I, telah merupakan "**Success Story**" yang diakui oleh seluruh dunia. Apalagi bila diingat posisi awal kita pada awal Orde Baru. Walaupun demikian, Presiden sendiri mengingatkan kita, bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak berarti bahwa kita tidak lagi memiliki kelemahan dan kekurangan. Di samping itu pembangunan nasional juga membawa akibat sampingan, khususnya dalam gangguan kamtibmas, berupa "**Organized Crime**", "**Corporate Crime**" dan lain-lain kejahatan bentuk baru, kerusuhan massa dan kejahatan yang sadistis. Di kota-kota besar gangguan kamtibmas telah mengarah kepada "**Fear of Crime**" di kalangan masyarakat. Masih adanya rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan, kesenjangan sosial -

ekonomi, pengangguran, daerah kumuh di kota-kota besar menambah kerawanan kamtibmas, termasuk yang tergolong SARA. Tidak pula dapat disangkal bahwa aparat pemerintah belum menampilkan diri seperti yang diamanatkan GBHN. Tidak hanya produktivitasnya yang rendah, belum profesional dan bertingkah laku sebagai pelayan masyarakat, masih banyak yang bersikap sebagai penguasa yang harus dihormati dan dilayani dan masih terdapat pula korupsi, kolusi dan lain-lain bentuk penyalahgunaan jabatan. Aparat penegak hukum sebagai bagian dari aparaturnegara dan aparaturnegara pun tidak terhindar dari masalah-masalah tersebut di atas. Semua ini akan menjadi tantangan dan kendala bangsa dan negara kita dimasa depan, di mana dituntut kemampuan bersaing dengan semua negara di dunia. Bila Indonesia dapat mempertahankan dan meningkatkan hasil pembangunan seperti dalam PJP I dan sekaligus mengatasi segala kelemahan yang masih ada maka sudah dapat dipastikan dalam PJP II, Indonesia akan menjadi "negara industri baru" seperti juga Malaysia, Thailand dan Filipina.

Keadaan Aparatur Penegak Hukum khususnya Polri dewasa ini

Sebagai bagian dari aparaturnegara dan aparaturnegara; aparat penegak hukum kita, keseluruhannya perlu disempurnakan secara berencana dan terus-menerus.

rencana realistis. Karena sasaran akhirnya adalah terkendalinya kamtibmas, adanya rasa aman dan tenteram anggota masyarakat, adanya kepastian hukum, perlindungan atas jiwa, harta benda dan hak azasinya, agar timbul kegairahan partisipasi masyarakat yang kreatif dalam pembangunan menuju cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (sesuai tata tenteram kerta raharja). Suasana kamtibmas yang demikian, memang harus dibiayai oleh pemerintah dan masyarakat sendiri (Siskamtibmas Swakarsa) dan tidak mungkin datang dengan sendirinya.

Seperti diamanatkan Presiden bahwa bila perlu Polri dapat minta bantuan unsur-unsur Angkatan Perang, maka prosedurnya harus dirumuskan secara jelas, untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan.

Koordinasi dan integrasi fungsional horizontal dari suatu sistem peradilan pidana yang terpadu (**Integrated Criminal Justice System**) seperti diatur KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, perlu dihayati dan dilaksanakan secara baik, hingga terhidar dari rivalitas institusional yang sangat merugikan masyarakat.

Kegiatan operasional dan pembinaan perlu "**didesentralisir**" sampai tingkat Polres, sehingga Mabes Polri dan juga Mapolda menitikberatkan fungsi perumusan kebijaksanaan dalam bentuk "**Peraturan**

Kapolri" serta Juklak dan Juknis secara nasional oleh Mabes Polri dan disesuaikan menurut keadaan daerah oleh Mapolda. Fungsi pembinaan, back-up operation serta pengawasan harus berjalan sesuai mata rantai hierarki organisasi Kepolisian RI. Untuk itu perlu dipertimbangkan kembali adanya "**General Staff Organisation**" ditingkat Mabes dan ditingkat Mapolda.

Dalam "**mengedepankan**" Polri yang berarti peran Polres perlu segera ditingkatkan menuntut pemilihan kualifikasi Kapolres yang lebih seksama dari yang sudah-sudah. Kapolres adalah "**Cermin**" Kapolri di lapangan karena langsung "**bersentuhan**" dengan masyarakat. Organisasi, personil dan sarana Polres, karena itu perlu diprioritaskan.

Kemampuan serta kepemimpinan manajerial seorang Kapolres tidak hanya akan dirasakan oleh anak buahnya di jajaran Polres yang bersangkutan, tetapi juga oleh seluruh instansi terkait, serta masyarakat di seluruh wilayah Polres. Seorang Kapolres tidak hanya memiliki peta dan data politik, ekonomi, sosial budaya dan kamtibmas di wilayahnya tetapi juga pimpinan informal seperti pimpinan agama, pimpinan adat dan lain-lain di wilayahnya. Untuk itu ia harus memiliki kemampuan komunikasi sosial yang cukup.

Untuk memenuhi kualifikasi tersebut di atas, disarankan :

- a) Perlu segera dipersiapkan buku pedoman yang tepat buat Kapolres, yang harus disiapkan oleh Tim di Mabes.
- b) Bila buku pedoman sudah ada, agar seluruh Kapolres yang sedang menjabat ditatar secara singkat. Ini dapat dilakukan terpusat, tetapi juga dapat di Polda-Polda atau gabungan beberapa Polda.
- c) Lembaga pendidikan, terutama SECAPA dan PTIK mengarahkan kurikulum, tenaga pengajar dan metode belajar mengajar kearah pengetahuan dan kemampuan Kapolres. Tentunya di PTIK sebagai Perguruan Tinggi diberikan pengetahuan akademis yang lebih luas dari SECAPA.

Pembangunan aparatur Polri hendaknya selalu berpegang pada pendekatan "**Sistem Manajemen Polri**" secara keseluruhan yang selanjutnya menyusun prioritas sub-sistem mana yang didahulukan, apakah sub-sistem "**Manajemen Operasional Kepolisian**" yang cukup luas,

apakah "**sub-sistem manajemen Personil atau Sumber Daya Manusia**", sub-sistem **Manajemen Materiil**", sub sistem manajemen Keuangan dan sebagainya. Polisi di dunia, termasuk Polri akan tetap "**Manpower Heavy**", karenanya "**sub-sistem manajemen personil**" perlu mendapat perhatian khusus. Pendidikan dan latihan adalah sub-sub sistem yang penting dari sub sistem manajemen personil, karena itu evaluasi dan kemudian pembangunan seluruh lembaga pendidikan dan pendidikan Polri, termasuk PTIK dan SELAPA harus segera dilakukan untuk disinkronisasikan dengan rencana pengiriman anggota Polri di luar lembaga pendidikan Polri, baik dalam maupun di luar negeri.

Penutup

Demikianlah secara ringkas uraian ini diberikan semoga dapat merupakan bahan masukan dalam menyusun rencana Pembangunan Polri dalam menghadapi gangguan kamtibmas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk 5 tahun mendatang (REPELITA VII).